

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu **“bagaimana Indonesia menguatkan pilar-pilar poros maritim sebagai respon terhadap perompakan dan pembajakan di Selat Malaka?”** penelitian ini menjelaskan bagaimana Kebijakan Poros Maritim turut mengambil peran dalam menekan kasus-kasus Pembajakan dan Perompakan yang ada di Perairan Selat Malaka. Dari lima pilar yang ada pada Kebijakan Poros Maritim, pilar diplomasi maritim dan keamanan maritim merupakan solusi yang baik untuk mengurangi perompakan dan pembajakan yang ada di Perairan Selat Malaka melalui kerjasama Patroli Terkoordinasi Trilateral MALSINDO serta bantuan panduan kapal.

Kejahatan maritim yang terjadi di Selat Malaka semakin beragam seperti: perompakan dan pembajakan, penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia hingga aksi terorisme, hal ini perlu ditangani secara lebih detail dan mendalam oleh ketiga negara pantai pemilik perairan Selat Malaka yaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia. Untuk mengamankan perairan Selat Malaka dibutuhkan komitmen yang tinggi dari ketiga negara pantai pemilik perairan Selat Malaka untuk menjalankan kerjasama yang lebih efektif dari kerjasama sebelumnya dan dapat mengurangi kejahatan maritim yang ada di perairan Selat Malaka, khususnya perompakan dan pembajakan. Kerjasama yang baik tidak hanya melibatkan Malaysia, Singapura dan Indonesia sebagai negara pantai pemilik perairan Selat Malaka namun juga memerlukan partisipasi dari negara-negara pengguna untuk menjamin keselamatan pelayaran bersama. Dengan adanya kerjasama seperti MALSINDO dan pemberian

layanan panduan kapal di Selat Malaka serta pengamanan dalam aksi militer, dapat di artikan sebagai langkah aktif untuk memberikan dampak nyata untuk mengurangi terjadinya kejahatan maritim.

Kebijakan poros maritim dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai strategi untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat akan kemaritimannya baik itu dalam hal keamanan maupun dalam hal konektivitas antar pulau, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Dalam menjalankan kebijakan poros maritim, diperlukan adanya kerjasama yang baik antar regional maupun secara global. Karena kebijakan poros maritim memerlukan adanya kesatuan dari berbagai komponen pendukung untuk dapat mengimplementasikan kelima pilar dengan baik, apabila tidak ada kesatuan untuk mewujudkan hal ini maka kebijakan poros maritim dapat dianggap sebagai kebijakan yang gagal.

Baik itu Malaysia, Singapura dan Indonesia selaku negara pantai pemilik perairan Selat Malaka tentunya memiliki kepentingannya masing-masing di perairan Selat Malaka. Seperti halnya Indonesia dan Malaysia yang menganggap perairan Selat Malaka penting dalam hal kedaulatan dan pertahanan negara sedangkan Singapura menganggap perairan Selat Malaka menjadi penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang besar. Indonesia sendiri memiliki sejarah akan mempertahankan perairan Selat Malaka dan menentukan garis batas dengan Malaysia melalui ratifikasi UNCLOS tahun 1982. Terjaminnya keamanan dan keselamatan perairan Selat Malaka tidak hanya menjadi penting bagi Malaysia, Singapura dan Indonesia selaku negara-negara pantai pemilik perairan Selat Malaka namun hal ini juga berpengaruh bagi negara-negara pengguna

perairan Selat Malaka. Banyak negara pengguna yang khawatir dengan adanya aksi kejahatan maritim di perairan Selat Malaka. Hal ini disebabkan karena perairan Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang rawan terjadinya kejahatan maritim seperti perompakan dan pembajakan, ditambah lagi dengan banyaknya kelompok-kelompok terror besar yang berada di sekitar perairan Selat Malaka seperti halnya GAM, Abu Sayyaf, MILF dan beberapa kelompok terror lainnya. Hal ini juga mendorong negara-negara pengguna seperti Amerika Serikat dan Jepang untuk turut berpartisipasi dalam pengamanan perairan Selat Malaka walaupun tidak dalam porsi penuh dan dibawah pengawasan Malaysia, Singapura dan Indonesia selaku ketiga negara pantai pemilik perairan Selat Malaka.

Dengan adanya kebijakan poros maritim sebagai wujud cita-cita dan harapan Indonesia untuk bangkit kembali menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang memiliki pengaruh yang signifikan dapat diwujudkan melalui Pilar Poros Maritim ke (4) Menerapkan diplomasi maritime melalui usulan peningkatan kerja sama dibidang maritime dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan bebagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan dan pilar Poros Maritim ke (5) Membangun kekuatan maritime sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritime merupakan pilar yang penting bagi Indonesia dalam menghadapi kasus pembajakan dan perompakan yang ada, karena Indonesia menggunakan kerjasama MALSINDO dan Layanan Panduan Pelayaran sebagai bentuk diplomasi maritime

Indonesia dan juga sebagai bentuk penguatan pertahanan keamanan kedaulatan Indonesia di Selat Malaka.

Tiap tahunnya di perairan Selat Malaka telah mengalami penurunan ancaman-ancaman kejahatan maritim seperti perampokan dan pembajakan, salah satu faktor yang mendorong terjadinya peningkatan keamanan ini adalah adanya kebijakan poros maritim yang bisa mengatur visi dan misi Indonesia dalam hal maritim kedepannya. Indonesia juga berhasil menunjukkan eksistensi kekuatannya melalui kebijakan poros maritim ini, penguatan lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal ini juga menjadi hal yang penting bagi internal Indonesia, kebijakan poros maritim juga ditampilkan dengan baik oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari cabinet kerja 2014-2019 yaitu Ibu Susi Pudjiastusi yang dapat mengambil langkah berani untuk mengatasi persoalan maritim yang ada. Namun, walaupun sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam kasus Perompakan dan Pembajakan di Selat Malaka, tiap pihak tetap perlu waspada terhadap setiap ancaman yang ada, karena bukan tidak memungkinkan akan muncul ancaman lain yang bisa mengganggu keamanan dan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bryman, Alan. *Social Research Methods* 4th Edition. New York: Oxford University Press, 2012.

Buzan, Barry. *New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*. International Affairs, Royal Institute of International Affairs, 1994.

Buzan, Barry. *People, State and Fear: The National Security Problem in International Relation*. Wheatsheaf Books, Michigan University, Michigan, 1983.

Dougherty, James E dan Robert L. Pfaltzgraff. *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher, 1997.

Gerard, Graham. *Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits*. Institute of Southeast Asian Studies / International Institute for Asian Studies, 2006.

Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan. *International Relations: the Key Concepts*. New York: Routledge, 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, Universitas Gajah Mada, 1969.

Keohane, Robert dan Joseph Nye. *Transnational Relations and World Politics*. London: Palgrave Macmillan, 1992.

Marsetio, *Indonesian Sea Power*. Jakarta: Indonesia Defense University, 2014.

Ma'soed, Mochtar. *Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1994.

- Merriam, Sharan B. *Qualitative Research a Guide to Design and Implementation*. San Francisco: Joey-Bass, 2009.
- Umaña, Filipe. *Threat Convergence Transnational Security Threats in the Strait of Malacca*. Washington DC: The Fund for Peace, 2012.
- Sorensen, George & Robert Jackson. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tuathaildan, Gearóid Ó. *Rethinking Geopolitics*. London: Routledge, 1998.
- Tummers, Ed. *The Future Maritime Security Environment*. *Maritime Affairs*: Summer, 1999.
- Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress, 2007.

Jurnal

- Chariszon, Noly. “Kerja Sama Littoral States (Indonesia dan Singapura) dalam Mengatasi Aksi Kejahatan di Selat Malaka”.
- Dipoyudo, Kirdi. “Persoalan di Sekitar Selat Malaka”, Jakarta: Analisa CSIS, 1975.
- Gerke, Solvay dan Han-Dieters. “Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia”. *Jurnal Akademika* Edisi 81, 2011.
- Hidayat, Safril dan Ridwan, “Kebijakan Poros Maritim dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan dan Harapan”. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 2017.

Hidayat, Safril dan Wawan. "Proxy War dan Keamanan Nasional Indonesia".
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 2017.

Keliat, Makmur. "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi
Indonesia". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

Nainggolan, Poltak Partogi. "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan
Implikasi Internasionalnya". Jurnal DPR RI, 2015.

Saeri, M, "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka". Jurnal Transnasional,
vol 4, no 2, 2013.

Tarrant, Bill. "Balancing Powers in the Malacca Strait". Global News Journal,
2010.

Till, Geoffrey. "New Direction in Maritime Strategy". Naval War College Review
Vol. 60 Number 4, 2007.

Till, Geoffrey. "Sea Power: A Guide for the Twenty First Century". Routledge,
2004.

Dokumen

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Indonesia Resmi Pandu Kapal Selat Malaka.
2017, Media Internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

IPU dan DCAF, Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices. 2003.

Lemhanas RI, Bahan Ajar Bidang Studi Geopolitik dan Wawasan Nusantara, 2017.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. 2014, Pidato Joko Widodo 15 November 2014.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No: 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal. Pasal 1.

ReCAAP ISC, The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia, annual report from 2019.

UNODC, ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery against Ships, annual reports from 2003-2009.

UNODC, ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery against Ships, annual report from 2006

UNODC, ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery against Ships, annual report from 2017

Karya Perorangan

Maulidy, Achmad Insan. (2011) “Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura Dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka”, Skripsi Sarjana Ilmu Sosial, UIN.

Nuswantoro, Edhi. (2008) “Strategi Penanganan Perompakan di Selat Malaka dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Negara di Laut”, Tesis Sarjana S-2 Program Studi Ketahanan Nasional Minat Manajemen Pertahanan, Universitas Gadjah Mada.

Sanubari, Ida Bagus. (2005) “Meningkatkan Pengamanan Selat Malaka Guna Mencegah Internasionalisasi Asing Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI”, Kertas karya perorangan, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Suhana. (2008) “Deklarasi Djuanda: 13 Desember Perjalanan Panjang Menuju Negara Kepulauan”.

Website

Li, Chen Wei. “Keeping watch over the Malacca Straits”. MINDEF (Ministry Of Defence), 21 April, 2006.

http://www.mindef.gov.sg/imindef/resourcelibrary/cyberpioneer/topics/articles/news/2006/April/21apr06_news.print.img.html (diakses pada 11 Juni 2019).

“Fact Sheet: The Malacca Straits Patrol”. MINDEF (Ministry Of Defence), 21 April, 2016. <https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and->

[events/latest-releases/article-detail/2016/april/2016apr21-news-releases-00134/](https://www.imo.org/Events/latest-releases/article-detail/2016/april/2016apr21-news-releases-00134/) (diakses pada 11 Juni 2019).

“Maritime Security and Piracy”. International Maritime Organization, 2006.

<http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/MaritimeSecurity.aspx>

(diakses pada 11 Juni 2019).

“Strait of Malacca”. Partnerships in Environmental Management for the Seas of

East Asia (PEMSEA), 2013. [http://www.pemsea.org/profile/pollution-](http://www.pemsea.org/profile/pollution-hotspots/malaccastraits)

[hotspots/malaccastraits](http://www.pemsea.org/profile/pollution-hotspots/malaccastraits) (diakses pada 11 Juni 2019).